

#### 4. Romusha

Romusha sering diartikan sebagai kerja paksa pada masa perang dunia 2, yakni antara 1942-1945. Sebenarnya, arti kata romusha sendiri adalah buruh atau pekerja. Sama dengan rodi, tujuan dari romusha bukan ekonomi namun untuk membantu kepentingan militer Jepang.

Laki-laki yang berbadan sehat dipekerjakan sebagai prajurit, sedangkan yang tidak mampu berperang dijadikan sebagai pekerja kasar. Perempuan muda dipekerjakan sebagai pelacur, sedangkan yang sudah tua dijadikan pembantu di kamp militer.

Mobilisasi manusia terjadi secara *massive*, sebab para pekerja di kirim ke tempat-tempat yang menjadi titik pertahanan pasukan Jepang. Tidak hanya di nusantara, bahkan ada yang sampai di kirim ke China. Wajar kalau angka kematian yang diakibatkan sistem ini meningkat secara signifikan.

Di sisi lain, produktivitas yang dihasilkan oleh sistem ketenagakerjaan ini jauh lebih tinggi dari rodi. Sebab rakyat bekerja dengan porsi yang lebih besar. Para pekerja hanya diberi makan sekali dalam sehari. Bahan makanan yang berkualitas baik diserahkan ke militer Jepang sebagai cadangan logistik.

#### 5. Modern Outsourcing

Konsep *modern outsourcing* ialah hubungan diadik yang sifatnya *mutual* antara pengguna atau *user* dan penyedia jasa ketenagakerjaan atau *vendor*. Secara teknis ia mirip dengan sistem kuli kontrak, namun sedikit berbeda dalam hal posisi tawar. Pada sistem ini, *user* menyerahkan suatu bidang pekerjaan atau satu divisi kepada *vendor* seperti; penagihan, logistik, dan lain-lain.

Pihak vendor mengerjakan pekerjaan tersebut mulai dari perekrutan karyawan, penggajian, jaminan sosial, dan administrasi lainnya. Sama seperti dulu, kontrak kerjasama dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan perusahaan.

Jika dulu sistem *outsourcing* membuat orang sulit lepas dari pekerjaan, saat ini sistem *outsourcing* dibuat untuk memudahkan pemutusan hubungan kerja.

Pekerja yang tidak produktif dapat diganti dengan mudah tanpa berbelit-belit, tentunya dengan mengemukakan bukti-bukti yang sah di mata hukum. Dalam proses PHK, pekerja tidak dapat menuntut apapun kepada siapapun atas apapun karena semua sudah tertera pada kontrak yang telah ditandatangani di awal masa kerja. Sangat efisien bukan?

#### Penutup

Nah, berdasarkan penjabaran diatas. Dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata bangsa Indonesia lebih produktif jika bekerja dalam keadaan terpaksa. *Dipecut* dulu baru mau bekerja. Sering terlena dalam kenyamanan. Apa benar demikian? Jika benar, mulai saat ini sudah menjadi tugas kita untuk merubahnya. Sebab bekerja akan lebih nyaman jika kita diperlakukan sebagai manusia.

Kita harus bersyukur kepada Tuhan, bahwa pada saat ini bentuk kerja paksa jaman kolonial telah dihapuskan dari dunia modern. Ini harus kita hargai dengan bekerja sebaik-baiknya, apapun sesuai bidang kita masing-masing. Untuk diri, keluarga, dan bangsa.

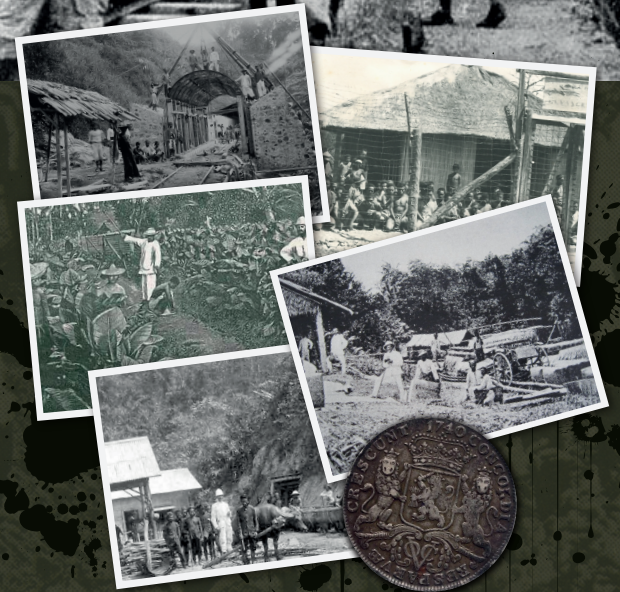
Bayangkan jika pada masa ini, semua orang belajar dan bekerja sekeras orang-orang di masa kolonial. Sudah pasti tingkat kesejahteraan masyarakat akan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi, hilangkan budaya malas. Mari bekerja keras.

*Dihimpun dari berbagai sumber*

Penanggung Jawab	: Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP
Penulis	: Dharma Kelana Putra, S.Sos
Editor	: Dr. Suprayitno, M.Hum
Setting/ Layout	: Angga, S.Sos

# KERJA PAKSA

Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia dari Masa ke Masa



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH





Sejak dulu nusantara kita adalah wilayah yang kaya akan hasil-hasil bumi, seperti komoditi pertanian, perkebunan serta bahan tambang. Jumlahnya yang sangat banyak membutuhkan SDM yang banyak pula untuk mengelolanya. Mulai dari proses kultivasi, refinasi, pengolahan, distribusi, hingga penjualan.

Pada masa masa kolonial, negara-negara Eropa saling berkompetisi memperluas wilayah koloninya. Suatu negara berperang dengan negara lain. Perang ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini membuat dunia usaha dipaksa untuk meningkatkan produktivitasnya guna membiayai ekspansi besar tersebut. Eksploitasi daerah koloni harus lebih *massive*, apapun harus jadi uang. Strategi pun berubah, dari monopoli dagang sampai ke perbudakan yang berganti-ganti rupa.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menerapkan sistem ketenagakerjaan yang lebih efisien seperti kerja paksa dan sebagainya. Sejak saat itu, sistem ketenagakerjaan mulai berkembang dengan pesat. Hubungan industrial antara pekerja-pengusaha diatur sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Bagaimana sistem ini berkembang, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk ikatan ketenagakerjaan yang pernah diterapkan di Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang.

### 1. Kerja Rodi

Mendengar kata *rodi*. Terbayang dalam angan, kilasan-kilasan penindasan yang dialami oleh nenek moyang kita beberapa ratus tahun silam. Bekerja siang dan malam tanpa gaji, tiada hari tanpa pecutan, mengejar target penyelesaian dengan waktu istirahat yang singkat. Makan seadanya, minum pun di jatah.

Kerja Rodi ialah bentuk kerja paksa yang diterapkan oleh Herman William Daendels ketika ia ditugaskan sebagai Gubernur Jenderal oleh Napoleon ke wilayah nusantara tahun 1808-1811.

Tujuannya adalah untuk mengambil langkah strategis agar koloni Belanda di nusantara tidak jatuh ke tangan Inggris pasca dibubarkannya VOC tahun 1799.

Hasilnya, cukup fantastis. Ia sukses mendirikan benteng *Meester Cornelis*, fasilitas kesehatan militer, pabrik meriam di Semarang, Akademi Militer di Batavia, serta jalan raya pos dalam tempo singkat. Plus, kas negara yang tadinya kosong akibat perang kembali terisi sedikit demi sedikit.

### 2. Cultuurstelsel atau sistem pembudidayaan

Sistem ini diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch. Sistem ini berlangsung empat puluh tahun, terhitung sejak 1830 hingga 1870. Sistem ini mengantarkan Belanda pada kejayaannya di era kolonial. Karena keberhasilan tersebut, daerah koloni di Afrika mulai ditinggalkan dan Belanda memfokuskan eksploitasi secara *massive* dilakukan di nusantara.

Sistem ini didasari dengan anggapan bahwa seluruh wilayah nusantara adalah milik Belanda. Setiap penduduk di tiap desa wajib membayar sewa tanah setiap bulan. Sewa tanah tersebut dapat dilunasi dengan cara menggunakan 20% tanah untuk ditanami tanaman yang bernilai tinggi di pasar internasional seperti teh, kopi, karet, tebu, tembakau, dan sebagainya. Mereka yang tidak punya lahan, harus menyisihkan 20% waktu kerjanya selama setahun untuk mengerjakan lahan kebun milik pemerintah kolonial.

Dampak positifnya adalah, perekonomian di wilayah Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda semakin menguat, sedangkan dampak negatifnya penurunan produksi padi yang berakibat munculnya bencana kelaparan bagi masyarakat. *Cultuurstelsel* dihentikan setelah Pemerintah Belanda menerima tekanan dari dunia internasional tentang pelarangan perbudakan.

### 3. Kuli Kontrak

Sistem ini merupakan *outsourcing* pertama yang diperkenalkan oleh Biro Imigrasi *Deli Planteer Vereniging* (DPV) tahun 1888 di Sumatera Timur. Tujuannya untuk mengelola sumber daya manusia yang bekerja di perkebunan, agar mereka tidak meninggalkan pekerjaan dan terus terikat kontrak.

Para pekerja didatangkan dari luar Sumatera Timur, kebanyakan dari Jawa, Kalimantan, India, dan China. Mereka didatangkan karena penduduk setempat tidak mau menjadi kuli di perkebunan. Alasannya, karena kehidupan mereka sudah tercukupi dengan hasil bumi yang berasal dari tanah mereka. Lagipula, sebagian dari mereka terlahir dengan jiwa *entrepreneur* jauh sebelum kolonialisme hadir di Sumatera Timur.

Sistem ini melibatkan proses hukum yang *excessive* dengan dasar hukum *Koeli Ordonantie* tahun 1881. Penggunaan hukuman badan dibenarkan setelah dikeluarkannya *Poenale Sanctie* untuk pekerja yang tidak taat terhadap majikan mereka. Bentuk ini masih digunakan hingga saat ini, seperti di perusahaan-perusahaan jasa penyalur tenaga kerja, baik dalam atau luar negeri. Hanya saja, tanpa hukuman badan.

Sistem ini dilatarbelakangi ketika rekrutmen oleh agen menimbulkan berbagai masalah, salah satunya banyak pekerja yang lari dari pekerjaannya karena tidak tahan dengan kondisi yang mereka alami.

Para agen memiliki akses terhadap perusahaan asing pada masa itu, dan biasanya adalah orang-orang yang telah selesai masa kontraknya. Mereka ingin memperoleh lebih banyak uang dengan bertindak sebagai penyalur tenaga kerja. Dengan kesepakatan tertentu, agen mendapat bagian dari penghasilan orang-orang yang terikat kontrak dengan suatu perusahaan.